

IMPLIKASI SEORANG PEMIMPIN GEREJA MELAKUKAN KAMPANYE POLITIK DALAM MENDUKUNG PASANGAN CALON TERENTU

Lenny Chendralisan^{1*},

Januarli Marino Sibarani²

STT Rahmat Emmanuel^{1*,2}

Email: pdt_joshuams@yahoo.co.id

Abstrak

Pemimpin gereja memiliki peran yang signifikan dalam membimbing dan mempengaruhi jemaatnya, tidak hanya dalam hal-hal rohani, tetapi juga dalam isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk politik. Dalam era media sosial yang terus berkembang, partisipasi pemimpin gereja dalam kampanye politik di platform-platform tersebut menjadi semakin menonjol. Namun, keterlibatan ini tidak hanya membawa dampak bagi jemaatnya sendiri, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis dan moral yang mendalam. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kompleksitas keterlibatan pemimpin gereja dalam politik di era digital, dengan mempertimbangkan implikasi sosial, sikap, dan perilaku yang terkait. Melalui metode studi literatur yang berkaitan dengan pemimpin, politik, dan implikasi, maka diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman peran pemimpin gereja dalam konteks politik kontemporer dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga integritas spiritual sambil tetap terlibat dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh terhadap dukungan politik Pasangan Calon yang diberikan oleh pemimpin gereja dapat memengaruhi perilaku politik anggota gereja.

Kata kunci: pemimpin gereja; politik kontemporer; era digital

Abstract

Church leaders play a significant role in guiding and influencing their congregations, not only in spiritual matters but also in issues related to everyday life, including politics. In the ever-evolving era of social media, the participation of church leaders in political campaigns on digital platforms has become increasingly prominent. However, such involvement not only impacts their own congregations but also raises deep ethical and moral questions. This paper aims to explore the complexity of church leaders' engagement in politics in the digital age, considering the social implications, attitudes, and behaviors associated with such involvement. Through a literature study method related to leadership, politics, and their implications, this study seeks to provide a deeper understanding of the role of church leaders in contemporary political contexts and the challenges they face in maintaining spiritual integrity while remaining engaged in societal life. The influence of political support expressed by church leaders toward specific candidate pairs can affect the political behavior of church members.

Keywords: church leaders; contemporary politics; digital age

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi secara global, peran pemimpin gereja juga mengalami transformasi dari fungsi yang semata-mata spiritual ke arah yang lebih praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Jika pada masa lalu pemimpin gereja cenderung menjaga jarak dari keterlibatan dalam urusan politik, maka dalam konteks modern dewasa ini banyak pemimpin gereja yang terlibat secara aktif dalam aktivitas politik, termasuk dalam menyuarakan dukungan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu dalam pemilihan umum (den Dulk, 2020).

Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan ruang baru yang sangat kuat dalam membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku masyarakat. Media sosial kini menjadi alat penting dalam komunikasi politik untuk menyebarkan pesan, membangun citra, serta memobilisasi dukungan. Dalam konteks ini, pemimpin gereja juga memanfaatkan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menyatakan sikap politik mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pustaka Alvabet, 2021).

Namun demikian, keterlibatan pemimpin gereja dalam politik kerap menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai iman dan preferensi politik. Perbedaan pandangan dalam komunitas gereja dapat menimbulkan konflik internal, bahkan memperluas polarisasi di tengah masyarakat. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan spiritual dari dukungan politik yang diberikan oleh pemimpin gereja (Steenbrink, 2015).

Di samping itu, muncul pula pertanyaan-pertanyaan etis mengenai batas-batas partisipasi politik oleh pemimpin agama. Apakah tindakan ini bertentangan dengan prinsip pemisahan antara gereja dan negara? Apakah hal tersebut memperkuat atau justru melemahkan otoritas moral pemimpin di mata jemaatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks teologis, sosial, dan hukum yang berlaku (den Dulk, 2020; Steenbrink, 2015).

Dalam konteks Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum, keterlibatan pemimpin gereja seringkali terlihat dalam bentuk dukungan terbuka di media sosial terhadap paslon tertentu. Studi-studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterlibatan ini berdampak signifikan terhadap orientasi politik anggota jemaat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implikasi jangka panjang dari partisipasi

pemimpin gereja dalam ruang politik digital, terutama dalam hal relasi antara gereja dan negara, serta peran sosial gereja dalam menjaga stabilitas dan persatuan (Pustaka Alvabet, 2021).

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan studi literatur yang berkaitan dengan pemimpin, politik, budaya, serta konsultasi dengan beberapa narasumber yang memahami tentang kepemimpinan dan praktik politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini mengintegrasikan beragam teori dan pemahaman untuk menjelaskan kompleksitas partisipasi politik oleh pemimpin gereja dalam mendukung pasangan calon tertentu di media sosial. Oleh karena itu, pembahasan dimulai dari konsep pemimpin dan gereja, baik dari perspektif umum maupun Alkitabiah.

Pemimpin

Dalam perspektif umum, pemimpin dipahami sebagai individu yang mengambil inisiatif dan memengaruhi orang lain. Leighton Ford (1991) mendefinisikan pemimpin sebagai seseorang yang "take the lead" dan mampu "move people to follow them" (hlm. 25). Artinya, kepemimpinan menyangkut inisiatif, perencanaan, serta kapasitas untuk dihargai dan diikuti. Kepemimpinan bukan hanya tentang tindakan, tetapi menyangkut siapa diri seseorang itu sesungguhnya; dengan kata lain, "Leadership is not first of all something one does, but something one is" (Ford, 1991, hlm. 39). Dengan demikian, pribadi pemimpin menjadi elemen yang paling menentukan dalam efektivitas kepemimpinannya. Parak (2002) menambahkan bahwa kepemimpinan adalah seni dan metode dalam memengaruhi, mengajak, meyakinkan, mengatur, dan memberdayakan orang lain demi tercapainya visi dan misi bersama. Hal ini menekankan bahwa kemampuan seorang pemimpin harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, namun keberhasilannya tetap sangat dipengaruhi oleh integritas pribadi pemimpin itu sendiri.

Dari perspektif Alkitabiah, kepemimpinan dipandang sebagai panggilan ilahi untuk memimpin umat dengan kasih, kebijaksanaan, dan keadilan. Dalam Efesus 4:15, misi kepemimpinan gereja adalah membawa jemaat untuk "bertumbuh di dalam segala

hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala." Pemimpin dipilih Allah untuk memberikan teladan hidup yang benar (Ibr. 13:7). Dalam hal ini, pemimpin gereja sering kali juga diidentifikasi sebagai gembala, yakni mereka yang memelihara umat seperti seorang gembala menjaga domba-dombanya (Suharso & Retnoningsih, 2011). Douglas (2011) menjelaskan bahwa panggilan sebagai gembala telah ada sejak zaman Habel (Kej. 4:2), dan tugas tersebut merupakan tanggung jawab ilahi yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Pengertian gembala dalam konteks teologi Kristen berkaitan erat dengan pelayanan yang mencakup merawat, mengajar, dan menuntun jemaat secara menyeluruh (Wongso, 2009). Dalam Alkitab, tokoh-tokoh seperti Musa, Daud, dan Yesus Kristus menjadi gambaran ideal dari kepemimpinan yang berasal dari Allah (Singgih, 2004).

Secara teologis, pemimpin yang disebut sebagai gembala bertugas untuk memelihara dan merawat umat Tuhan secara total. Kamus Alkitab menekankan bahwa gembala adalah figur penting dalam konteks Israel, karena seluruh kehidupan sangat tergantung pada keberadaan domba (Browning, 2011). Oleh karena itu, pemimpin gereja idealnya bukan hanya mengajar atau berkhotbah, tetapi juga mendidik jemaat secara kreatif, dinamis, dan kontekstual agar terjadi pertumbuhan rohani (Y. Bangun, 2010). Teladan yang diberikan oleh gembala sangat menentukan arah pertumbuhan spiritual jemaat.

Gereja

Secara umum, gereja sering dipahami sebagai tempat ibadah umat Kristen. Namun pada hakikatnya, gereja adalah komunitas orang percaya yang berkumpul untuk menyembah Tuhan, melayani satu sama lain, serta memberitakan Injil kepada dunia (McGrath, 2006). Awalnya, gereja merupakan komunitas sederhana yang berfokus pada persekutuan iman, namun berkembang menjadi lembaga yang terorganisir secara geografis dan administratif. Hal ini menyebabkan pergeseran pemahaman, di mana banyak orang hanya memaknai gereja sebagai bangunan fisik (Powell, 1997).

Menurut pandangan Alkitab, kata "gereja" dalam Perjanjian Lama berasal dari istilah *qahal* dan *'edhah*, yang masing-masing berarti "dipanggil keluar" dan "berkumpul karena perjanjian" (Berkhof, 2021). Kedua kata ini sering digunakan secara bersamaan untuk menunjuk umat yang berkumpul dalam perjanjian dengan Allah (Kel. 12:6; Bil. 14:5). Dalam Perjanjian Baru, istilah *ekklesia* dipakai untuk menyebut gereja sebagai

komunitas orang yang dipanggil keluar untuk mengikuti Kristus (1 Kor. 3:16; Ef. 1:22–23).

Gereja tidak hanya memiliki fungsi liturgis, tetapi juga sosial dan ekoteologis. Gereja bertugas memperhatikan pergumulan hidup umat dan bukan sekadar menyelenggarakan program internal. Kusuma (2009) menekankan bahwa fokus utama gereja adalah pelayanan keluar, bukan hanya pelayanan ke dalam struktur institusional gereja. Gereja dipanggil untuk menjadi representasi kasih Allah kepada masyarakat luas.

Lebih jauh lagi, gereja memiliki tanggung jawab ekologis. Kejadian 2:15 menyebut bahwa manusia dipanggil untuk "mengusahakan dan memelihara taman," yang dimaknai sebagai tugas pelestarian ciptaan. Gereja perlu mengajarkan tanggung jawab sosial, keadilan, dan kedulian terhadap lingkungan dalam setiap layanannya (Powell, 1997). Dengan demikian, kepemimpinan gerejawi bukan hanya soal spiritualitas internal, tetapi juga berdampak pada kesadaran sosial dan ekologis jemaat.

Cannistraci (2014) mengidentifikasi tiga tantangan utama gereja masa kini, yaitu: (1) kesatuan tubuh Kristus, (2) kebangunan rohani, dan (3) penggenapan Amanat Agung. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa gereja memiliki mandat besar untuk menghadirkan transformasi spiritual dan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin gereja adalah pribadi yang dipanggil untuk memimpin dengan kesetiaan, kejujuran, dan integritas moral sesuai prinsip-prinsip Alkitab. Pemimpin yang demikian tidak hanya membawa jemaat pada pengenalan iman yang benar, tetapi juga menjadi teladan dalam tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan belas kasih. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang memiliki integritas, yakni adanya kesesuaian antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan (Parak, 2002; Y. Bangun, 2010).

Pengertian Politik

Secara umum, politik dapat dipahami sebagai aktivitas, tindakan, atau langkah yang berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan dalam masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Politik mencakup proses pengambilan keputusan, pengaturan kekuasaan, interaksi sosial, serta upaya mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini meliputi mekanisme dalam membuat keputusan terkait distribusi sumber daya, hak, kewajiban, dan kewenangan; cara kekuasaan diperoleh dan digunakan; serta bagaimana negosiasi dan

konflik digunakan untuk menyelesaikan perbedaan dan membentuk kesepakatan sosial (Heywood, 2013).

Dari perspektif Alkitab, politik memang tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi prinsip-prinsip mengenai pemerintahan, keadilan, dan kepemimpinan sangat ditekankan. Roma 13:1–7 menegaskan bahwa semua otoritas berasal dari Allah, dan pemerintah dipahami sebagai pelayan Allah untuk menegakkan keadilan. Mikha 6:8 menggarisbawahi pentingnya keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam kepemimpinan. Ajaran Yesus dalam Markus 10:42–45 menyampaikan bahwa pemimpin harus menjadi pelayan, bukan penindas. Prinsip pelayanan ini menjadi dasar dalam menafsirkan peran politik pemimpin dari sudut pandang iman. Selain itu, Kisah Para Rasul 4:32–35 menggambarkan pentingnya pengelolaan sumber daya secara adil untuk kesejahteraan bersama (Closson, 2020).

Teori Komunikasi

Dalam konteks komunikasi politik dan media sosial, teori komunikasi massa seperti *agenda setting* dan *framing* memberikan pemahaman tentang bagaimana pesan politik disampaikan, diterima, dan diproses oleh publik. Teori *agenda setting* menjelaskan bagaimana media memengaruhi perhatian publik terhadap isu tertentu. Dalam konteks ini, keterlibatan pemimpin gereja dalam politik melalui media sosial berpotensi membentuk agenda publik baik secara lokal maupun nasional (Fitrianah, 2018). Sementara itu, teori *framing* menggambarkan bagaimana pesan dikemas untuk memengaruhi interpretasi audiens. Cara pemimpin gereja membungkai pesan dukungan terhadap pasangan calon (paslon) politik tertentu dapat membentuk persepsi jemaat terhadap isu dan kandidat tersebut.

Teori Sosiologi Agama

Teori sosiologi agama memberikan kerangka untuk memahami bagaimana institusi keagamaan dan pemimpinnya memengaruhi dinamika sosial. Pertama, dari perspektif kekuasaan dan otoritas, keterlibatan pemimpin gereja dalam politik melalui media sosial dapat memengaruhi struktur otoritas dalam komunitas, baik dengan memperkuat maupun menggeser hierarki yang ada. Kedua, dari perspektif identitas dan solidaritas, dukungan politik tersebut bisa memperkuat ikatan sosial atau justru

menimbulkan konflik internal. Ketiga, dari perspektif perilaku politik, keterlibatan ini dapat memicu polarisasi atau sebaliknya, membuka ruang dialog. Keempat, dari sudut legitimasi dan kredibilitas, keterlibatan politik bisa meningkatkan atau justru mengikis kepercayaan publik terhadap gereja. Kelima, dari sisi nilai budaya, keterlibatan pemimpin gereja dalam politik mencerminkan bagaimana norma agama dan budaya saling memengaruhi dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hubungan antara agama dan politik (Burhani, 2019).

Teori Etika

Dalam konteks etika, keterlibatan pemimpin gereja dalam kampanye politik menimbulkan pertanyaan moral yang kompleks. Seorang pemimpin gereja memiliki otoritas moral dan spiritual dalam komunitasnya, namun ketika ia menggunakan posisi tersebut untuk menyuarakan dukungan terhadap paslon tertentu melalui media sosial, maka muncul isu tentang batas antara peran keagamaan dan politik. Apakah tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial atau penyalahgunaan kekuasaan spiritual? Selain itu, pemimpin tersebut perlu dipertanyakan apakah pilihan politiknya didasarkan pada nilai moral atau kepentingan pribadi. Jika paslon yang didukung justru bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka hal ini bisa menimbulkan krisis moral di tengah jemaat. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye juga menuntut pertanggungjawaban atas keakuratan dan integritas pesan yang disampaikan (Takwin, 2017).

Teori Hubungan Gereja dan Negara

Teori hubungan gereja dan negara, seperti teori pemisahan institusi atau pluralisme agama, memberikan wawasan terhadap dilema yang dihadapi ketika pemimpin gereja terlibat dalam politik. Dalam masyarakat demokratis, pemisahan antara gereja dan negara bertujuan menjaga netralitas institusi agama dalam urusan politik. Namun, ketika pemimpin gereja menggunakan media sosial untuk mendukung paslon, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk intervensi politik yang mengganggu keseimbangan antara kebebasan beragama dan netralitas institusi (Wijayanto, 2017). Di sisi lain, pemimpin gereja juga memiliki hak sebagai warga negara untuk mengekspresikan pandangannya. Tantangannya terletak pada bagaimana menjaga agar

suara politik yang disampaikan tidak mengaburkan peran gereja sebagai institusi spiritual yang inklusif. Hal ini dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap independensi gereja dan dapat memengaruhi kepercayaan publik (Magnis-Suseno, 2014).

Sikap Gereja dan Pemimpinnya

Pemimpin gereja memiliki tanggung jawab moral dan etis yang besar dalam menyampaikan pesan dan memengaruhi komunitas mereka, termasuk dalam konteks kampanye politik di media sosial. Mereka harus mampu mempertahankan integritas spiritual sambil memainkan peran konstruktif dalam masyarakat dan politik. Hal ini penting agar gereja tetap menjadi sumber inspirasi dan panduan moral tanpa terjebak dalam dinamika politik yang partisan (Tong, 2017). Pertama, pemimpin gereja perlu menunjukkan *netralitas dan kebijaksanaan* dengan tidak secara terbuka mendukung pasangan calon tertentu. Sikap ini membantu menjaga posisi pemimpin sebagai figur yang dapat dihormati oleh seluruh anggota jemaat. Kedua, *pendekatan edukatif* dapat ditempuh dengan memberikan informasi objektif tentang isu-isu politik yang relevan, sekaligus menyampaikan panduan moral yang bersumber dari nilai-nilai iman Kristen. Ketiga, pemimpin gereja dapat menekankan *isu-isu moral universal*, seperti keadilan sosial, perdamaian, hak asasi manusia, dan perawatan lingkungan. Fokus pada isu-isu tersebut memungkinkan gereja tetap relevan dalam diskursus politik tanpa terseret dalam partisanisme (Sumartana, 2007). Keempat, mereka harus *menghindari penyebaran informasi yang tidak benar* di media sosial, karena sebagai pemimpin moral, mereka bertanggung jawab menjaga integritas pesan yang disampaikan. Kelima, pemimpin gereja sebaiknya berperan dalam *membangun dialog dan keharmonisan sosial* melalui retorika yang mengedepankan nilai inklusivitas, toleransi, dan persatuan.

Fungsi Gereja dan Pemimpinnya

Dalam perspektif Alkitab, gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya yang dipanggil untuk hidup setia kepada-Nya. Gereja berfungsi sebagai komunitas yang diutus untuk mewartakan Injil, mengajarkan kebenaran iman, dan melayani sesama dengan kasih. Pemimpin gereja, baik itu gembala, penatua, maupun pengawas, adalah pribadi yang dipanggil Tuhan untuk memimpin dengan teladan,

menggembalakan dengan kasih, dan menjaga integritas jemaat melalui pengajaran yang benar (Sumartana, 2007). Dalam konteks kampanye politik di media sosial, para pemimpin gereja harus tetap menjaga kesetiaan mereka terhadap panggilan ilahi dan prinsip-prinsip Injil. Mereka diharapkan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membagikan pesan-pesan rohani, memperkuat iman, dan mendorong kehidupan yang bermoral dan beretika. Keterlibatan dalam politik praktis yang partisan harus dihindari, karena berisiko menimbulkan perpecahan di tengah jemaat. Sebaliknya, media sosial dapat menjadi alat untuk membangun persatuan dan mempromosikan kasih Kristus di tengah keberagaman. Pemimpin gereja sebaiknya memprioritaskan kepentingan Kerajaan Allah di atas kepentingan pribadi maupun politik dunia, sebagaimana fungsi dasar mereka sebagai teladan dalam kekudusan, kebijaksanaan, dan kasih (Tong, 2017).

Dampak Partisipasi Pemimpin Gereja dalam Mendukung Paslon Tertentu

Partisipasi pemimpin gereja dalam mendukung pasangan calon tertentu melalui media sosial dapat menimbulkan berbagai dampak yang kompleks. Salah satu dampak utama adalah *polarisasi opini* di kalangan jemaat. Jemaat yang sejalan dengan pandangan politik pemimpinnya mungkin akan menguatkan keyakinan mereka, sedangkan yang berbeda pandangan bisa merasa terpinggirkan, bahkan meninggalkan gereja (Anggraini, 2019). Selain itu, *pengaruh terhadap pilihan politik* sangat mungkin terjadi, mengingat pemimpin gereja memiliki otoritas moral yang besar di mata para jemaat. Dukungan politik yang ditunjukkan secara terbuka dapat memengaruhi preferensi politik jemaat, terutama bagi mereka yang cenderung mempercayai setiap arahan rohani dari pemimpinnya. Dampak lainnya adalah *pembentukan identitas politik* jemaat yang mengikuti pola pikir dan keberpihakan pemimpinnya, sehingga politik menjadi bagian dari identitas spiritual mereka. Di sisi lain, partisipasi ini juga bisa memengaruhi *persepsi publik terhadap gereja*. Gereja yang terlihat mendukung kandidat politik tertentu mungkin dipandang tidak lagi netral secara spiritual, melainkan sebagai alat kepentingan politik. Terakhir, situasi ini dapat memicu *pembagian dalam komunitas gereja*, sebab perbedaan pandangan politik yang terlalu tajam bisa menimbulkan konflik interpersonal dan mengganggu keharmonisan dalam persekutuan. Oleh karena itu, pemimpin gereja perlu mempertimbangkan secara matang dan bijaksana sebelum terlibat secara terbuka dalam dukungan politik (Sumartana, 2007; Anggraini, 2019).

KESIMPULAN

Implikasi seorang pemimpin gereja yang secara aktif melakukan kampanye politik dalam mendukung pasangan calon tertentu sangat signifikan dan kompleks, baik bagi dirinya sendiri, komunitas jemaat, maupun citra gereja secara keseluruhan. Keterlibatan tersebut dapat menimbulkan polarisasi dalam tubuh jemaat, memicu konflik internal, serta merusak kesatuan dan keharmonisan komunitas yang seharusnya dibangun di atas kasih, toleransi, dan persaudaraan dalam Kristus. Selain itu, dukungan politik terbuka dapat menggoyahkan integritas moral dan spiritual pemimpin, mengaburkan identitas gereja sebagai institusi rohani, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap gereja sebagai tempat yang netral dan inklusif. Pemimpin gereja yang terlalu terlibat dalam politik partisan juga berisiko memanipulasi otoritas rohani demi kepentingan politik tertentu, sehingga mereduksi peran profetik gereja yang seharusnya menjadi suara kebenaran yang kritis dan independen terhadap segala bentuk kekuasaan duniawi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijaksanaan dan kepekaan teologis dalam menyikapi godaan untuk berpolitik praktis, agar pemimpin gereja tetap setia pada panggilannya sebagai pelayan Firman dan gembala umat yang mengarahkan jemaat kepada nilai-nilai Kerajaan Allah, bukan kepada agenda-agenda kekuasaan yang fana dan penuh kepentingan pribadi atau kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkhof, L. (2021). Teologi Sistematika: Doktrin Gereja. Surabaya: Momentum.
- Browning, W. R. F. (2011). Kamus Alkitab. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Cannistraci, D. (2014). Eklesiologi: Visi Allah untuk Gereja. Malang: Gandum Mas.
- Douglas, J. D. (2011). Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid I. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Ford, L. (1991). Transforming Leadership. Downers Grove: InterVarsity Press.
- Kusuma, S. A. (2009). Kaya di Bumi, Memerintah Bersama Yesus di Surga. Yogyakarta: Gereja Bethany Fresh Anointing.
- McGrath, A. E. (2006). Christian Theology: An Introduction. Oxford: Wiley-Blackwell.

- Parak, J. (2002). *Pembelajar dan Pelayan*. Jakarta: Institut Darma Mahardika.
- Powell, J. (1997). *Visi Kristiani: Kebenaran yang Memerdekakan Kita*. Yogyakarta: Kanisius.
- Singgih, E. G. (2004). *Kepemimpinan Musa dalam Perjanjian Lama*. Makassar: INTIM.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Wongso, P. (2009). *Theologia Pengembalaan*. Malang: Literatur SAAT.
- Yosafat Bangun. (2010). *Integritas Pemimpin Pastoral*. Yogyakarta: Andi.
- den Dulk, K. R. (2020). *Religion and politics in America: Faith, culture, and strategic choices*. Rowman & Littlefield.
- Steenbrink, K. (2015). *Politik dan agama: Studi tentang hubungan antara gereja dan negara di Indonesia*. Mizan.
- Pustaka Alvabet. (2021). *Agama, politik, dan media sosial: Implikasi partisipasi pemimpin agama dalam pemilihan umum*. Pustaka Alvabet.
- Burhani, A. N. (2019). *Agama dan politik di Indonesia: Dilema umat beragama dalam pesta demokrasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Closson, D. (2020). *Biblical principles for political engagement: Worldview, issues, and voting*. ERLC Publishing.
- Fitrianah, D. (2018). *Penggunaan media sosial dalam kampanye politik*. Universitas Indonesia.
- Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Magnis-Suseno, F. (2014). *Gereja, negara, dan masyarakat: Refleksi kritis atas hubungan gereja dengan politik di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Takwin, B. (2017). *Etika politik: Sebuah pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Wijayanto. (2017). *Agama dan politik: Studi kasus Gereja Katolik di Indonesia pasca-Reformasi*. Jakarta: Kompas.
- Anggraini, G. A. (2019). *Pengaruh pemimpin gereja terhadap perilaku politik anggota gereja di Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata). Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sumartana, T. (2007). *Gereja dan politik*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Tong, S. (2017). *Gereja di tengah-tengah dunia*. Jakarta: Momentum.